

Peran USAID Melalui Program IUWASH-PLUS di Kota Probolinggo Tahun 2017-2021 dalam Perspektif Paradiplomasi

USAID's Role through The IUWASH-PLUS Program in Probolinggo City 2017-2021 in Paradiplomacy Perspective

Cepi Novia Tristantri*, Haryo Prasodjo**

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

Email: *cepinoviatristantri@webmail.umm.ac.id, **haryoprasodjo@umm.ac.id

Riwayat Artikel

Diterima: 19 September 2023
Direvisi: 2 April 2024
Disetujui: 29 April 2024

doi: 10.22212/jp.v15i1.4296

Abstract

Indonesia has created a national priority program to support the SDGs point 6, focusing on clean water and adequate sanitation. The city of Probolinggo still lacks access to clean water and proper sanitation. The community still uses open/public latrines, access to sanitation is limited, and the consumption of adequate drinking water has not yet reached the national and universal target of 100%. In order to achieve the target, USAID is partnering with the city of Probolinggo through the IUWASH PLUS program in an effort to provide proper sanitation and clean water in the city. This research uses paradiplomacy as a framework to explain the role of subnational actors in international relations, specifically between USAID and the City of Probolinggo. The research method used is descriptive qualitative based on a case study of collaboration between the Probolinggo City Government and USAID IUWASH-PLUS in 2017-2021. Reference sources come from published data and documents at the Central Statistics Agency, USAID IUWASH-PLUS, USAID IUWASH Tangguh, as well as raw data from the Probolinggo City Bappedalitbang. This research concludes that the IUWASH PLUS Program carried out by the Probolinggo City Government with USAID is successful. This is demonstrated by the development achievements for the proper sanitation sector in Probolinggo City which reached 95.95% and open defecation fell to 4.05%, while access to drinking water reached 100% consisting of piped services at 59.60% and non-piped services at 40.40 % at the end of the mentoring period.

Keywords: Paradiplomacy; Probolinggo City; USAID; IUWASH-PLUS.

Abstrak

Studi Indonesia menciptakan program prioritas nasional untuk mendukung keberlangsungan program SDGs poin 6 tentang air bersih dan sanitasi layak. Kota Probolinggo masih jauh dari akses air bersih dan sanitasi layak. Masyarakatnya masih menggunakan jamban terbuka/umum, akses sanitasi terbatas, serta konsumsi air minum layak yang belum mencapai target nasional dan universal, yakni 100%. Oleh sebab itu, USAID hadir untuk menjadi mitra Kota Probolinggo untuk mencapai target ini melalui Program IUWASH PLUS dalam upaya penyediaan sanitasi layak dan air bersih di Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan paradiplomasi sebagai kerangka berpikirnya yang menjelaskan peran aktor-aktor subnasional dalam hubungan internasional, dalam hal ini antara USAID dengan Kota Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berdasarkan studi kasus kerja sama Pemerintah Kota Probolinggo dengan USAID IUWASH-PLUS pada tahun 2017-2021. Sumber referensi bersumber dari publikasi data dan dokumen pada Badan Pusat Statistik, USAID IUWASH-PLUS, USAID IUWASH Tangguh, serta data mentah yang

berasal dari Bappedalitbang Kota Probolinggo. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Program IUWASH PLUS yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan USAID berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan capaian pembangunan untuk sektor sanitasi layak Kota Probolinggo yang mencapai 95,95% dan BABS turun menjadi 4,05%, sedangkan akses untuk air minum mencapai 100% yang terdiri dari layanan perpipaan 59,60% dan non perpipaan sebesar 40,40% pada akhir masa pendampingan.

Kata Kunci: Paradiplomasi; Kota Probolinggo; USAID; IUWASH-PLUS.

Pendahuluan

Paradiplomasi merupakan hubungan antar pemerintah subnasional yang menjembatani kepentingan pembangunan antar daerah di luar negeri. Pemda dapat membangun hubungan dengan aktor asing, baik negara maupun non-negara.¹ Di Indonesia, praktik paradiplomasi kerap dilakukan antar pemda. Kebangkitan paradiplomasi di Indonesia didorong oleh domestikasi isu-isu global, desentralisasi kekuasaan, dan fragmentasi lembaga pusat yang dulunya berkuasa.² Fenomena ini membawa pada pendekatan hubungan internasional yang lebih terdesentralisasi, dimana lebih banyak perhatian diberikan pada aktor-aktor subnasional seperti kota dan provinsi. Praktik paradiplomasi di Indonesia dibingkai dalam sistem negara kesatuan dimana pemerintah pusat masih mendominasi kegiatan luar negeri pemda³. Praktik paradiplomasi yang dilakukan sering kali berfokus pada bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan politik⁴. Praktik paradiplomasi setidaknya memiliki empat tujuan utama, yaitu untuk keperluan bisnis kreatif, pembangunan untuk program tata

kelola kota, promosi lokal untuk menarik investor, serta sebagai upaya untuk membuka akses ke pasar global⁵.

Paradiplomasi di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan. Yakni pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014⁶ tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada pemda untuk mengatur dan menjalankan hubungan luar negeri dalam ruang lingkup yang ditentukan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018⁷ tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur struktur organisasi pemda dan bagian yang berkaitan dengan hubungan luar negeri daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017⁸ tentang Tata Cara dan Tata Naskah Pelaksanaan Kerja Sama Internasional yang berisi pedoman tentang tata cara dan tata naskah pelaksanaan kerja sama internasional termasuk di dalamnya kerja sama yang dilakukan oleh pemda. Pemda dapat menggunakan hubungan

- 1 Kamilski Ciesielska-Klikowska, "Paradiplomacy and its Impact on EU Foreign Policy," *Journal of Contemporary European Research*, no. 1 (Juli 2022): 48-66.
- 2 Ario Bimo Utomo, "Paradiplomacy as a Product of State Transformation in The Era of Globalisation: The Case of Indonesia," *Janus.net e-Journal of International Relations*, no. 1 (Oktober 2022): 63-78.
- 3 Windy Dermawan, Ivan Darmawan, Mustabsyrotul Ummah Mustofa, Yusa Djuyandi, "Paradiplomacy practices in Indonesia: Comparative analysis of Aceh-Quebec," *Politics and Policy*, no. 2 (Maret 2022): 363-379.
- 4 Alan Tidwell, "Strategic Competition and The Evolving Role of Indo-Pacific Paradiplomacy," *Australian Journal of International Affairs*, no. 1 (Oktober 2020): 103-119.

- 5 Diego Santos Vieira de Jesus, "The Art of Encounter: Paradiplomacy and Internationalization of Creative Cities," *Revista de Sociologia e Politica*, no. 2 (Maret 2017): 51-76.
- 6 Pemerintah Pusat, "Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan," Badan Pemeriksa Keuangan, 30 September 2014, diakses 12 Desember 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- 7 Pemerintah Pusat, "Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan," Badan Pemeriksa Keuangan, 21 Agustus 2018, diakses 30 April 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/92041/pp-no-39-tahun-2018>.
- 8 Pemerintah Pusat, "Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan," Badan Pemeriksa Keuangan, 17 September 2017, diakses 30 April 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111443/permendagri-no-85-tahun-2017>.

internasionalnya untuk membuat kebijakan luar negeri lebih responsif terhadap isu prioritas dalam negeri⁹. Salah satu topik paradiplomasi yang kerap dilakukan di Indonesia adalah tentang implementasi poin-poin Sustainable Development Goals (SDGs).

USAID atau United States Agency for International Development adalah badan pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program bantuan pembangunan di luar negeri. Dibentuk pada tahun 1961 oleh Presiden John F. Kennedy yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada negara-negara mitra dalam upaya pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Sehingga program-programnya mencakup berbagai sektor seperti air bersih dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pemberdayaan ekonomi¹⁰. United States Agency for International Development-Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (USAID IUWASH) merupakan salah satu program gagasan USAID yang dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi, dan kebersihan di Indonesia. Program ini mencakup peningkatan layanan air bersih, sanitasi yang aman, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat. USAID IUWASH bekerja sama dengan pemda, lembaga-lembaga pemerintah, dan mitra lokal untuk merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah¹¹.

Penelitian ini penting karena Program IUWASH-PLUS sejalan dengan Tujuan ke-6 Sustainable Development Goals (SDGs)

9 Fritz Nganje. "Sub-State Diplomacy and The Foreign Policy-Development Nexus in South Africa," *South African Journal of International Affairs*, no. 1 (Maret 2016): 1-20.

10 USAID IUWASH Tangguh, "Kegiatan Kami," USAID IUWASH Tangguh, 21 Maret 2022, diakses 12 Desember 2023, <https://iuwashtangguh.or.id/kegiatan-kami/>.

11 USAID IUWASH Tangguh.

yang menargetkan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi. Sehingga penting untuk mengevaluasi kontribusi program terhadap pencapaian target-target tersebut dalam penyediaan sanitasi layak dan air bersih Kota Probolinggo, khususnya pada rentang tahun 2017 hingga 2021. Pemilihan Kota Probolinggo sebagai unit analisis studi kasus berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, mempertimbangkan ketersediaan data dan akses informasi yang memadai di Kota Probolinggo. Kedua, kehadiran program IUWASH-PLUS di Kota Probolinggo menunjukkan bahwa kota tersebut telah menjadi fokus perhatian untuk meningkatkan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Hal ini dapat menjadi contoh kasus yang menarik untuk menganalisis bagaimana kerjasama antara pemda dengan aktor internasional seperti USAID dapat memberikan dampak positif. Ketiga, jika Kota Probolinggo menghadapi masalah yang signifikan terkait dengan akses air bersih dan sanitasi layak, maka hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kota-kota dengan kondisi serupa di Indonesia. Tabel dibawah ini menunjukkan sebaran mitra Program IUWASH PLUS di Indonesia:

Kota Probolinggo terletak di Provinsi Jawa Timur dengan total luas wilayah 56,667 km²¹². Wilayah administrasi Kota Probolinggo terdiri dari 5 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kademangan, Kedopok, Wonoasih, Mayangan, dan Kanigaran¹³. Menurut data Kota Probolinggo dalam Angka

12 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, & Kawasan Pemukiman, "Geografis," Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan & Kawasan Pemukiman, 31 Desember 2014, diakses 19 Desember 2023, <https://dpuprpkp.probolinggokota.go.id/page/geografis>.

13 Badan Pemeriksa Keuangan. "Kota Probolinggo", Badan Pemeriksa Keuangan, 27 Desember 2020, diakses 18 Desember 2023, <https://jatim.bpk.go.id/kota-probolinggo/>.

Tabel 1. Daftar Mitra Pemda Program IUWASH PLUS

Sumatera Utara	Jawa Barat, DKI Jakarta, Tangerang (Jabodetabek)	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sulawesi Selatan, Indonesia Timur
Kota Medan	DKI Jakarta	Kota Surakarta	Kota Surabaya	Kota Makassar
Kota Tebing Tinggi	Kab Tangerang	Kab Sukoharjo	Kab Gresik	Kab Baru
Kota Sibolga	Kota Bekasi	Kota Salatiga	Kab Sidoarjo	Kab Bantaeng
Kota Pemantang Siantar	Kota Depok	Kab Magelang	Kota Probolinggo	Kab Bulukumba
Kab. Deli Serdang	Kota Bogor	Kota Magelang	Kab Probolinggo	Kab Maluku Tengah
	Kab Karawang	Kab Sragen	Kab Lumajang	Kota Ternate
	Kab Bogor	Kab Wonosobo	Kab Malang	Kota Jayapura Kab Jayapura

Source: USAID Final Report, 2022

2023, jumlah penduduk Kota Probolinggo sebanyak 243.000 jiwa pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,70% pada tahun 2022. Di tahun 2017, kepadatan penduduk Kota Probolinggo sebesar 4.155,31 orang/km²¹⁴, sedangkan jumlah ideal kepadatan penduduk yaitu 500 jiwa/km².

Kondisi ini kemudian menimbulkan permasalahan baru, yaitu tekanan pada sumber daya air perkotaan, perumahan yang tidak layak, masalah kesehatan, serta tingkat higienis yang minim. Hal ini dibuktikan dengan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kota Probolinggo pada tahun 2015 hanya mencapai 81,45%¹⁵, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak Kota Probolinggo tahun 2015 hanya mencapai 99,71%, sedangkan target nasional saat itu adalah 100%. Pada tahun

2015, persentase jarak rumah tangga ke tempat penampungan kotoran yang berjarak lebih dari 10 meter sebesar 66,68%. Tahun 2014, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum tidak layak di Kota Probolinggo masih sebesar 15,79%. Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB bersama tahun 2015 sebesar 13,10%, sedangkan penggunaan fasilitas BAB umum pada 2015 sebesar 2,74%. Kondisi ini masih jauh dari target universal akses, yaitu 100%¹⁶. Cakupan pelayanan air bersih PDAM Kota Probolinggo tahun 2019 sebesar 59,62% atau sebanyak 19.938 sambungan rumah. Namun, cakupan ini masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah setempat, yaitu sebesar 80% dari jumlah penduduk¹⁷.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang peran USAID melalui Program IUWASH-PLUS dalam upaya penyediaan

14 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, & Kawasan Pemukiman, "Geografis."

15 BPS Provinsi Jawa Timur, "Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Bersih", BPS Provinsi Jawa Timur, 13 Juni 2023, diakses 18 Desember 2023, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/06/13/2900/persentase-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-sumber-air-minum-bersih-dan-akses-air-minum-layak-2022.html>

16 BPS Provinsi Jawa Timur, "Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Bersih."

17 Silvia Risma Alviyani, Arlini Dyah Radityaningrum, "Evaluasi Sistem Pengolahan dan Distribusi Air Bersih PDAM Kota Probolinggo," Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, no. 1 (Desember, 2021): 1-8.

sanitasi dan air bersih di Kota Probolinggo yang terfokus pada tahun 2017-2021. Dengan penulisan ini, diharapkan terdapat informasi komprehensif tentang dampak dan perubahan yang ditimbulkan dari adanya Program IUWASH-PLUS oleh USAID di Kota Probolinggo untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih.

Penelitian yang dilakukan oleh Vieira (2017)¹⁸ mengungkapkan bahwa aktor subnasional aktif dalam mengembangkan praktik paradiplomasi sebagai bagian integral dari proses internasionalisasinya. Vieira menyoroti empat faktor utama yang mendorong perkembangan paradiplomasi. Pertama, daerah aktif dalam meningkatkan kapasitas bisnis kreatif dan kewirausahaan budaya. Kedua, pembangunan kemitraan dalam program rehabilitasi ruang kota yang baik. Ketiga, promosi kualitas lokal, serta yang keempat adalah peran lembaga internasional sebagai faktor yang mendukung paradiplomasi daerah.

Scicchitano J S (2019) mengungkapkan bahwa di negara-negara berkembang, terdapat 4 dimensi kata kunci paradiplomasi, yaitu akses, ketersediaan, pemanfaatan, dan stabilitas¹⁹. Dary, N. H., Dwi, I., Nurhaeni, A., & Suharto, D. G. (2019) menyebut bahwa Kemitraan Publik-Privat (PPP) Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengembangan Internasional Amerika Serikat (USAID) dalam pelaksanaan program Air, Sanitasi, dan Kebersihan (IUWASH) berusaha meningkatkan sanitasi Indonesia yang saat ini berada di peringkat terendah di ASEAN²⁰.

18 Diego Santos Vieira de Jesus. "The Art of Encounter: Paradiplomacy and Internationalization of Creative Cities." *Revista de Sociologia e Politica* no. 2 (Maret 2017): 51-76.

19 John Scicchitano. "International Measurement of Food Security: Enhancing Alignment Between Evidence and Assistance Programs". *Journal of Public Affairs*, no. 3 (Juni 2018): 18-37.

20 Nida Hanin Dary, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Didik G. Suharto, "Strengthening The Role of Public Administration in The Global Changing Society: Public Sector Reform &

Sehingga, rumusan masalah yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah "Bagaimana kontribusi Program IUWASH-PLUS yang didukung oleh USAID dalam peningkatan akses, kualitas, dan keberlanjutan penyediaan sanitasi dan air bersih di Kota Probolinggo selama periode 2017-2021?". Dalam konteks teori paradiplomasi, keterlibatan Kota Probolinggo dengan USAID melalui Program IUWASH-PLUS dilihat sebagai bentuk kerja sama teknis luar negeri. Melalui program ini, Kota Probolinggo memperoleh akses sumber daya, dukungan teknis, dan pendanaan internasional, sesuai dengan prinsip-prinsip paradiplomasi, pertama, diadakan dalam rangka membangun hubungan damai; kedua, saling menghormati kedaulatan negara mereka sendiri; ketiga, memperkuat hubungan persahabatan untuk jangka waktu yang panjang²¹.

Penelitian ini memiliki asumsi utama bahwa peningkatan peran USAID melalui Program IUWASH-PLUS di Kota Probolinggo selama periode 2017-2021 secara signifikan berkontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan air bersih, dengan dampak positif terhadap kondisi kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Asumsi utama ini didukung dengan asumsi pendukung bahwa keterlibatan aktif USAID dalam pembangunan sanitasi dan air bersih di Kota Probolinggo telah memberikan dorongan strategis untuk mengatasi tantangan teknis dan kelembagaan yang dihadapi oleh pemda. Program IUWASH-PLUS diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi, meningkatkan kesadaran akan

Digital Transformation in Asia," Indonesia Association for Public Administration, no. 1 (November 2019): 448-471.

21 Rogier van der Pluijm, Jan Melissen, *City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics*, (Netherland, 2007), 33-36.

pentingnya kebersihan, dan merangsang praktik hidup sehat. Dalam konteks paradiplomasi, interaksi antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan USAID diharapkan dapat memberikan keuntungan strategis dalam mendapatkan dukungan teknis dan keuangan dari lembaga internasional.

Kerangka Teori

Istilah 'paradiplomacy' pertama kali diperkenalkan oleh seorang akademisi asal Basque, Panayotis Soldatos, pada tahun 1980-an dalam konteks perdebatan akademis. Istilah ini merupakan hasil gabungan dari kata 'paralel' dan 'diplomacy' yang digabungkan menjadi 'paradiplomacy,' merujuk pada konsep 'kebijakan luar negeri pemerintahan non-pusat' menurut Aldecoa, Keating, dan Boyer. Pemahaman ini sejalan dengan istilah lain yang diusulkan oleh Ivo Duchacek untuk konsep yang sama, yaitu 'micro diplomacy'²².

Paradiplomasi merupakan kebijakan dan praktik kebijakan luar negeri oleh pemda²³. Paradiplomasi secara umum merupakan aktivitas yang dilakukan oleh entitas di tingkat sub-nasional atau sub-negara untuk mengembangkan hubungan diplomatik dengan mitra asingnya. Dengan demikian, negara tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang terlibat, melainkan entitas di tingkat sub-nasional mulai mengambil peran aktif dan turut serta dalam kegiatan hubungan internasional demi kepentingan masing-masing unit yang terlibat.

Di Indonesia, pemda diizinkan untuk melakukan hubungan internasional atau diplomasi kota/provinsi sebagai bentuk

dukungan terhadap pemerintah pusat²⁴ berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemda untuk mengelola urusan luar negeri dalam ruang lingkup yang ditentukan, yaitu pada bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan. Proses ini melibatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional. Pemda berperan utama dalam mengelola dan menjalankan paradiplomasi di tingkat lokal. Pemerintah pusat berperan menetapkan kerangka kebijakan nasional dan memberikan arahan kepada pemda, sementara pemda bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan paradiplomasi di Indonesia didasarkan pada prinsip saling mendukung dan saling menghormati. Pemerintah pusat memberikan bimbingan dan dukungan kepada pemda dalam mengelola hubungan internasional, sementara pemda bertindak sesuai dengan kebijakan dan kepentingan nasional. Selain pemerintah pusat dan daerah, aktor-aktor lain seperti organisasi non-pemerintah (NGO) di tingkat daerah, media, dan pihak swasta juga dapat terlibat dalam pelaksanaan paradiplomasi. Praktik paradiplomasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan kepentingan pemda (kota/provinsi) secara spesifik²⁵.

Koehane dan J.S Nye dalam *Transnational Relations and World Politics* menggambarkan

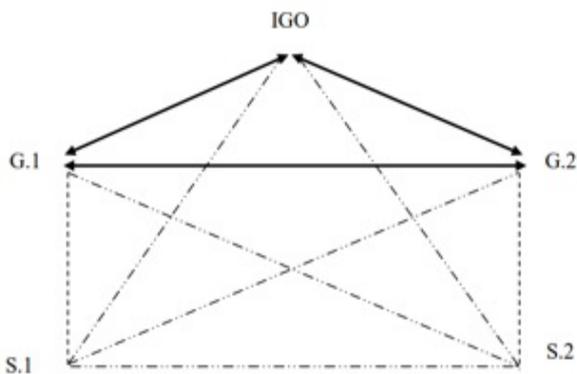
22 Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*, (Yogyakarta, 2013), 54-56.

23 Surwandono, Ali Maksun, "The Architecture of Paradiplomacy Regime in Indonesia: A Content Analysis, *Global: Jurnal Politik Internasional*, no. 1 (Juli 2020): 77-99.

24 Rika Isnarti, Sofia Trisni, "The City of Padang Challenges for Paradiplomacy," *AEGIS: Journal of International Relations*, no. 2 (September 2020): 48-68.

25 Takdir Ali Mukti, *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia* (Yogyakarta: 2020), 64-66.

struktur dan pola hubungan transnasional sebagai acuan teoritis. Hal itu digambarkan pada skema berikut ini:



Sumber: *The University of Wisconsin Press Journals Division, 2010.*

Gambar 1. Struktur Pola Hubungan Internasional yang Bersifat Transnasional sebagai Aktor dalam Hubungan Internasional

Keterangan:

IGO : Inter Government Organization (Lembaga Internasional)

G : Government

S : Society (Masyarakat)

———— Politik Antar Negara

----- Politik Dalam Negeri

.. .. Interaksi Transnasional

Keohane menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional yang tidak lagi bersifat *state-centric*, namun sudah lebih bersifat transnasional di mana aktor-aktor non pemerintah sangat besar perannya dalam menciptakan hubungan antar bangsa²⁶. Sifat hubungan internasional yang bercorak transnasional ini memang menjadi kecenderungan dunia setelah munculnya era globalisasi, maka tidak mengherankan jika pemikir seperti Quincy Wright memaknai

hubungan internasional dengan pengertian yang sangat luas dan tidak terkungkung dengan pemikiran yang *state-centric*. Q. Wright menyatakan bahwa hubungan internasional melibatkan berbagai aktor, antara lain negara, pemerintahan daerah, masyarakat, regional, aliansi, konfederasi, organisasi internasional, bahkan perusahaan internasional²⁷.

Dalam konteks paradiplomasi, penda bertindak sebagai pelaksana kebijakan luar negeri daerah dan menjalin kerjasama dengan entitas internasional untuk memajukan pembangunan lokal. Sementara itu, masyarakat, melalui organisasi non-pemerintah atau komunitas lokal, dapat berpartisipasi dalam dialog internasional, pertukaran budaya, dan proyek-proyek pembangunan bersama. Hubungan antara aktor-aktor ini didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan saling penghargaan, di mana kolaborasi efektif memungkinkan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat lokal maupun global.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus kerja sama antara Pemkot Probolinggo dan USAID IUWASH-PLUS dalam upaya meningkatkan akses air bersih dan sanitasi layak di Kota Probolinggo dari tahun 2017 hingga 2021. Metode penelitian mengandalkan analisis mendalam terhadap data publikasi dari Badan Pusat Statistik, USAID IUWASH-PLUS, dan USAID IUWASH Tangguh, serta data mentah dari Bappedalitbang Kota Probolinggo. Pernyataan pendukung bersumber dari penelitian terdahulu yang bersumber dari Scopus dengan

²⁶ Joseph S. Nye Jr, Robert O Keohane, "Transnational Relations and World Politics: An Introduction," *The University of Wisconsin Press Journals Division*, no.3 (Agustus 2010): 329-333.

²⁷ Q Wright, *Attitudes and The Fundamental Negative Bias: Conditions and Corrections*, (New York: Springer, 1988), 3-21.

penggunaan kata kunci 'Probolingo City', 'USAID', 'USAID IUWASH PLUS', dan 'Paradiplomacy'.

Proses analisis dilakukan dengan memahami rangkaian kegiatan dan implementasi Program IUWASH PLUS oleh USAID yang bersumber dari dokumen resmi USAID IUWASH FINAL REPORT serta dokumen arsip pada Badan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Probolinggo yang kemudian ditelaah menggunakan perspektif paradiplomasi dalam hubungan internasional.

Pemilihan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus untuk penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diselidiki, dalam hal ini, kerjasama antara Pemkot Probolinggo dan USAID IUWASH-PLUS. Kedua, studi kasus memungkinkan fokus yang lebih spesifik pada kasus tunggal, memungkinkan analisis yang lebih terperinci dan kontekstual. Terakhir, dalam kerangka paradiplomasi, pemahaman tentang peran aktor-aktor subnasional seperti Pemkot Probolinggo menjadi penting, dan studi kasus memungkinkan eksplorasi yang lebih baik tentang peran dan interaksi aktor-aktor terlibat dalam konteks kerjasama dengan USAID. Oleh karena itu, metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus merupakan pendekatan yang sesuai untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, terfokus, dan kontekstual tentang kerjasama tersebut.

Penggunaan metode lain dirasa kurang sesuai untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan pada penelitian ini. Metode kuantitatif kurang sesuai untuk digunakan karena fokus penelitian ini lebih pada pemahaman mendalam daripada pengukuran

statistik. Fenomena paradiplomasi sering melibatkan nuansa kompleks yang sulit diukur dengan angka-angka. Selain itu, pendekatan eksperimental juga dirasa kurang sesuai diterapkan karena penelitian ini lebih bersifat observasional dan mengeksplorasi dinamika hubungan antara pemda dan lembaga.

Kronologi Kerjasama Pemkot Probolinggo dengan USAID



Sumber: Arsip Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2023.

Gambar 2. Tampilan Partnership Agreement antara Pemkot Probolinggo dengan USAID dalam Program IUWASH PLUS Tahun 2017

Dalam konteks peran USAID melalui program IUWASH-PLUS di Kota Probolinggo tahun 2017-2021, alur pendelegasian paradiplomasi dari Pemerintah Pusat ke Pemda dijelaskan dalam tahapan dibawah ini:²⁸

28 Pemerintah Kota Probolinggo-IUWASH PLUS, "Partnership Agreement Between The Government of Probolinggo City and Indonesia Urban Water, Sanitation & Hygiene, Penyelamatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS)", Pemerintah Kota Probolinggo-IUWASH PLUS, (Maret 2017): 1-7.

1. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Luar Negeri atau instansi terkait lainnya, menetapkan kebijakan dan program-program strategis terkait dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam hal ini akses air bersih dan sanitasi layak sesuai dengan SDGs.

2. USAID, sebagai agen eksternal yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, merancang Program IUWASH-PLUS sebagai inisiatif untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang air bersih dan sanitasi. Program ini diimplementasikan di Kota Probolinggo sebagai salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

3. USAID berkolaborasi dengan Pemkot Probolinggo dalam pelaksanaan Program IUWASH-PLUS. Pemda berperan sebagai mitra dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Di tingkat lokal, Pemkot Probolinggo bertanggung jawab atas implementasi program-program yang telah disepakati bersama dengan USAID. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya, koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dan pelaksanaan kegiatan lapangan untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi layak di wilayah Kota Probolinggo.

5. Selama periode 2017-2021, pemda dan USAID melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program IUWASH-PLUS di Kota Probolinggo. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat.

Dengan demikian, alur pendelegasian paradiplomasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemda melibatkan kerjasama

antara Pemerintah Pusat, USAID, dan Pemda Kota Probolinggo dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program-program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi layak di tingkat lokal.

Kerja sama antara Pemkot Probolinggo dengan USAID diawali dengan disahkannya Partnership Agreement dengan nomor 004/IUWASH PLUS/PA-K/I/2017 antara Pemkot Probolinggo dengan USAID dengan program Indonesia Urban Water, Sanitation & Hygiene (IUWASH PLUS) pada Januari 2017 bertempat di Kota Probolinggo²⁹. Kerja sama ini mengacu pada USAID Assistance Agreement No. 497-AA-030 Tanggal 29 September 2014 antara Pemerintah Amerika Serikat dan Republik Indonesia, Individual Arrangement antara Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan USAID Tanggal 11 Mei 2016, Technical Arrangement antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan USAID tanggal 26 Juli 2016, serta Kesepakatan Kemitraan Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH PLUS) Nomor: 193/264/012/2016³⁰ 001/IUWASH PLUS/PA-Pr/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016. Tujuan Kesepakatan Kemitraan ini adalah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi di Kota Probolinggo sebagai bagian dalam upaya mencapai target universal akses untuk air minum dan sanitasi.

29 Pemerintah Kota Probolinggo-IUWASH PLUS, "Partnership Agreement Between The Government of Probolinggo City and Indonesia Urban Water, Sanitation & Hygiene, Kesehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS)", Pemerintah Kota Probolinggo-IUWASH PLUS, (Maret 2017): 1-7.

30 Ibid.

**Peran USAID dalam Program IUWASH
PLUS di Kota Probolinggo Tahun 2017-
2021**

Tabel 2 Program Kerja USAID IUWASH PLUS Kota Probolinggo

Program Air Minum	Program Sanitasi
1. Target HR1: 2.500 KK	1. Target HR2: 1.525 KK
2. Sosialisasi CWL	2. Program <i>Micro Finance</i> Sanitasi
3. Pendampingan Penyusunan RPAM Konsumen	3. Promosi & Advokasi <i>Safely Managed Sanitation</i>
4. <i>Review</i> RISPAM	4. Advokasi pertumbuhan Wira Usaha WASH
5. <i>Capacity Building</i> SDM	5. <i>Capacity Building</i> SDM
6. Pengendalian NRW	6. <i>Capacity Building</i> untuk Pengelola IPAL Komunal
7. Optimalisasi GIS untuk mendukung program NRW	7. Advokasi pembentukan kelembagaan pengelola ALD yang lebih professional
8. Program <i>Micro Finance</i> Sambungan Baru PDAM	8. <i>Review</i> SOP ALD dan implementasinya
9. Promosi <i>Safely Managed Water</i>	9. Pendampingan <i>Readiness Criteria</i> Pembangunan IPLT
Program Regulasi	Program Gender Mainstreaming
1. <i>Capacity Building</i> untuk Dewan Pengawas PDAM	1. <i>Gender awareness</i> untuk komunitas
2. Advokasi dan Penguatan Pokja Sektor WASH	2. <i>Gender awareness</i> bagi stakeholders
3. Advokasi pelibatan masyarakat dalam pembangunan sektor WASH	3. Pendampingan implementasi PPRG bagi Pemda
4. Advokasi Penyertaan Modal Pemerintah kepada PDAM	
5. Advokasi Perwal STBM	
6. Advokasi Regulasi RISPAM	
7. Advokasi Penyusunan Perkada sektor Sanitasi berdasarkan Perda ALD.	
8. Advokasi Penegakan Regulasi Air Minum dalam pengembangan perumahan dan permukiman.	
Program Kegiatan Mobilisasi Masyarakat	
1. Advokasi dan kemitraan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa	
2. Peningkatan kesadaran masyarakat	
3. Peningkatan kapasitas bagi masyarakat	
4. Pendampingan untuk komunikasi dan marketing channel bagi masyarakat	
5. Promosi perubahan perilaku	
6. Jurnalisme Masyarakat (<i>Citizen Journalism</i>)	
7. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif	

Sumber: Arsip Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2023

Tabel 3. Kronologi Kegiatan Program IUWASH PLUS oleh USAID dan Pemerintah Kota Probolinggo

Tahun	Uraian Kegiatan	Format Kegiatan	Keterangan
2017	Sosialisasi Program IUWASH PLUS	Penyampaian rencana program IUWASH PLUS	POKJA AMPL
	Workshop Stakeholder Analysis Mitra Dampingan IUWASH PLUS	Pengumpulan informasi dasar tentang pemangku kepentingan IUWASH PLUS di Kota Probolinggo	POKJA AMPL
	FGD Penentuan Calon Lokasi Hotspot Kota Probolinggo	Penentuan lokasi hotspot calon dampingan sesuai dengan data-data dari PD terkait	POKJA AMPL
	Pra Visioning Workshop	Komunikasi hasil perencanaan kepada penentu kebijakan	POKJA AMPL
	Audiensi Walikota Probolinggo dengan Pimpinan IUWASH PLUS Nasional	Pemantapan Program Kerjasama Sektor Air Minum dan Sanitasi bagi Masyarakat Miskin untuk Pencapaian Universal Access 100 0 100 dan mempererat silaturahmi antara IUWASH PLUS dan Pemkot Probolinggo	POKJA AMPL
2018	Implementasi Urban STBM	Pendampingan pelaksanaan identifikasi rawan sanitasi dan air minum di 4 lokasi hotspot	POKJA AMPL
	Capacity building untuk promosi akses WASH	Peningkatan kesadaran masyarakat terkait sanitasi dan air minum	DINKES
	Pengumpulan data Index PDAM	Prosiding PDAM Index	PDAM
	Peningkatan Kinerja PDAM	Pelatihan penghitungan tarif air minum	PDAM
	Penyusunan Index Sanitation dan Governance Index	Hasil Sandex dan Godex Kota Probolinggo Tahun 2018	POKJA AMPL
	Penyusunan regulasi untuk mendukung pengembangan sektor WASH	Prosiding penyusunan Perwali STBM	DINKES
	Advokasi anggaran APBD untuk mendukung sektor WASH	APBD Sektor WASH	POKJA AMPL
	Lokakarya background study RPJM Sektor WASH	RPJM Sektor WASH	POKJA AMPL
Survei Data Dasar Lokasi Hotspot	Survei dan evaluasi pengambilan data dasar	POKJA AMPL	

	Survei Verifikasi B40	Survei verifikasi B40 untuk PDAM dan penerima manfaat dari DPUPR-PKP sambungan PDAM, pelatihan enumerator survei verifikasi B40 pelanggan PDAM dan pelatihan enumerator survei verifikasi B40 penerima manfaat tangki septik	
	Lokakarya penyampaian perkembangan program IUWASH PLUS	Hasil perkembangan program IUWASH PLUS	POKJA AMPL
2019	Workshop Sanitasi Index dan Government Index Tahun 2018	Hasil penghitungan Sanitasi Index pada Tahun 2018 sebesar 59% naik sebesar 9% dari tahun sebelumnya yaitu 50%, dan hasil penghitungan government index pada tahun 2018 sebesar 79%	POKJA AMPL
	FGD I Strategi Pemasaran Sanitasi Kota Probolinggo "Pentingnya Data Akses Air Minum dan Sanitasi untuk Mencapai Universal Access"	FGD I Strategi Pemasaran Sanitasi Kota Probolinggo "Pentingnya Data Akses Air Minum dan Sanitasi untuk Mencapai Universal Access"	POKJA AMPL
	FGD II Strategi Pemasaran Sanitasi Kota Probolinggo "Kesepakatan Jenis Data untuk Mencapai Universal Access"	Kesepakatan komitmen Pemerintah untuk penyediaan anggaran dan memenuhi kelengkapan data	POKJA AMPL
	FGD III Strategi Pemasaran Sanitasi Kota Probolinggo "Penentuan Stakeholder berdasarkan Pemetaan Pasar"	Rencana Strategi Pemasaran Sanitasi, pemetaan pasar untuk potensi hibah dan non hibah dan kesepakatan stakeholder yang terlibat dalam pemasaran sanitasi	POKJA AMPL
	Koordinasi Penyusunan Materi Siaran Sektor WASHI	Tersusunnya materi siaran program air minum dan sanitasi yang telah dilakukan Pemkot Probolinggo pada Radio Suara Kota yang dilakukan oleh Pokja AMPL	POKJA AMPL

	Workshop “Peran Serta Stakeholder untuk Mencapai 100% Akses Sanitasi melalui Penyusunan Strategi Pemasaran Sanitasi”	Pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dan Penyepakatan hasil Pemetaan Segmentasi pasar dan rencana kerja bersama untuk peningkatan akses sanitasi	POKJA AMPL
	FGD Analisa Kelembagaan Pengelola/ Operator Air Limbah Domestik	Review pengelolaan air limbah domestik yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Probolinggo, Analisis kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Draf rancangan regulasi kelembagaan.	POKJA AMPL
2020	Workshop Peran Serta Stakeholder Untuk Mencapai 100% Akses Sanitasi Melalui Penyusunan Strategi Pemasaran Sanitasi Di Kota Probolinggo	Mendorong dukungan pembiayaan sanitasi melalui Dana Korpri, CSR dan BAZNAZ	POKJA AMPL
	Penyusunan NRW (Non Revenue Water-Kehilangan air)	Tersusunnya Laporan NRW PDAM Kota Probolinggo	PDAM
	FGD Pembahasan Sanitasi Index dan Governance Index Kota Probolinggo	Didapatkannya hasil penilaian tiap-tiap indikator kegiatan Godex berdasarkan dokumen lampiran pendukungnya oleh OPD terkait	POKJA AMPL
	FGD Analisa Kelembagaan Pengelola/ Operator Air Limbah Domestik Kota Probolinggo	Hasil Analisa Operator ALD Kota Probolinggo	POKJA AMPL
	FGD Reviu Tarif Penyedotan Lumpur Tinja Kota Probolinggo	Hasil Review Tarif Penyedotan Lumpur Tinja Kota Probolinggo	POKJA AMPL
	Penyusunan Roadmap SPALD-P Kota Probolinggo	Dokumen Road Map SPALD-P Kota Probolinggo tersusun untuk periode 5 tahun	POKJA AMPL
	Pelatihan <i>Enumerator</i> Untuk Survei Cuci Tangan Pakai Sabun Di Rumah Tangga Kota Probolinggo	<i>Enumerator</i> memahami kuesioner,teknik wawancara dan pengamatan, cara mengisi jawaban yang benar serta input data CTPS	DINKES
	Survei Cuci Tangan Pakai Sabun Di Rumah Tangga Kota Probolinggo	Peningkatan perubahan perilaku dengan pendekatan STBM Pilar 2 yaitu menumbuhkan kesadaran pentingnya CTPS dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari	DINKES

Pelatihan Enumerator Untuk Survei Verifikasi Tingkat Kesejahteraan Program Hibah Air Minum di Kota Probolinggo	Enumerator memahami kuesioner, teknik wawancara dan pengamatan, cara mengisi jawaban yang benar serta input data program hibah air minum	DPUPR-PKP
Pelatihan Enumerator Survei Verifikasi Tingkat Kesejahteraan Pada Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum di Kota Probolinggo	Enumerator memahami kuesioner, teknik wawancara dan pengamatan, cara mengisi jawaban yang benar serta input data penerima hibah air minum	DPUPR-PKP
Survei Verifikasi Tingkat Kesejahteraan Sistem Sanitasi Individu dan Komunal di Kota Probolinggo,	Memastikan manfaat program air hibah air minum di Kota Probolinggo	DPUPR-PKP
Pelaksanaan Kegiatan Monev Partisipatif siklus 4 di 4 lokasi Hotspot	Terpantaunya kegiatan monev partisipatif di 4 lokasi hotspot	POKJA AMPL
Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia Melalui Siaran Radio Lokal "Kebersihan Tangan Untuk Semua"	Menguatkan kebutuhan masyarakat (demand creation) pada perilaku CTPS sehingga menjadi budaya perilaku Masyarakat melalui siaran radio	DISKOMINFO
Rembug Warga Monev Partisipatif di lokasi hotspot	Tindak lanjut hasil pendampingan di 4 lokasi hotspot	POKJA AMPL
Pertemuan Multipihak Melalui FGD Sebagai Upaya Mendorong Keberlanjutan Program WASH di Kota Probolinggo	Paparan Hasil Monev Siklus 4 dan Diskusi potensi dukungan Pemkot untuk melibatkan Tim Monev dalam setiap kegiatan sektor WASH Pasca pendampingan USAID IUWASH PLUS di Kota Probolinggo	POKJA AMPL
FGD Identifikasi dan Tindak Lanjut Penyebab Kecenderungan Turunnya Nilai FCR Dan Alternatif Solusinya Di PDAM Kota Probolinggo	Efisiensi biaya operasional di PDAM	PDAM
Pelatihan Enumerator Untuk Survei Verifikasi Tingkat Kesejahteraan Sambungan Baru PDAM Tahun 2019 di Kota Probolinggo	Enumerator memahami kuesioner, teknik wawancara dan pengamatan, cara mengisi jawaban yang benar serta input data sambungan baru PDAM	PDAM
Survey Verifikasi Tingkat Kesejahteraan Pada Penerima Manfaat Sambungan Baru PDAM Tahun 2019 di Kota Probolinggo	Mendapatkan masukan dari penerima manfaat Sambungan Baru PDAM Tahun 2019 di Kota Probolinggo	PDAM

	Audiensi dengan Walikota Probolinggo	Tersampainya hasil Godex dan Sandex tahun 2020, progres pendampingan NRW PDAM Kota Probolinggo, Progress Pendampingan penyusunan Roadmap SPALD-P dan kondisi eksisting sanitasi di Kota Probolinggo, serta kondisi IPLT Kota Probolinggo	POKJA AMPL
2021	Rapat koordinasi penyusunan RKTL Renbis PDAM Kota Probolinggo	Disepakatinya jadwal RKTL pendampingan penyusunan Renbis PDAM Kota Probolinggo	PDAM
	Penyusunan Laporan Akhir Fase 1 dan <i>Business Plan</i> BDS PUPUK Surabaya	Laporan Akhir Fase 1 dan <i>Business Plan</i> BDS PUPUK Surabaya	POKJA AMPL
	Diskusi konsep WASH Talkshow radio Suara Kota Probolinggo	Tereviu dan terevaluasinya siaran Talkshow di Radio suara Kota	POKJA AMPL
	Siaran Radio: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Tersampainya informasi sanitasi aman kaitannya dengan STBM di kota Probolinggo melalui Siran Radio	POKJA AMPL
	Pendampingan penyusunan Rencana Bisnis PDAM Kota Probolinggo	Tersusunnya Rencana Bisnis PDAM Kota Probolinggo	PDAM
	Program berkelanjutan pascaberakhirnya USAID IUWASH PLUS	Komitmen Pemkot Probolinggo untuk mendukung program RP-JMN 2020 2024 dan visi Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dalam pencapaian layanan air minum dan sanitasi aman Kota Probolinggo	POKJA AMPL
	Closing Ceremony Program USAID IUWASH PLUS	Akhir Kerjasama Program USAID IUWASH PLUS	POKJA AMPL

Sumber: Diolah penulis.

Bentuk kerja sama yang dilaksanakan IUWASH PLUS berupa:¹

a. Menyediakan tenaga ahli teknis untuk mendorong peningkatan akses terhadap air minum yang aman dan sarana sanitasi yang layak bagi kelompok masyarakat paling miskin

dan paling rentan di perkotaan.

b. Menyediakan perangkat, cara, proses dan metodologi teknis yang sesuai untuk mendukung implementasi program.

c. Melakukan pendampingan, advokasi dan pelatihan maupun tukar pengalaman antar daerah untuk mendorong implementasi program.

d. Menyelenggarakan pertemuan

¹ Pemerintah Kota Probolinggo-USAID IUWASH PLUS. "Kronologi Kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dengan USAID IUWASH PLUS Tahun 2017-2021", (Maret 2017): 1-9.

koordinasi dan/atau pertemuan teknis dan/atau lokakarya terkait dengan pelaksanaan program IUWASH PLUS

Sementara itu, kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kerja sama ini dapat dilihat pada Tabel 3 di atas.

Meningkatkan Layanan Water Sanitation and Hygiene (WASH) Rumah Tangga

Akses sanitasi/sanitasi ramah lingkungan yang didukung oleh IUWASH PLUS terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan hygiene. Pada tahap penampungan, dilakukan sosialisasi tentang Jamban Sehat Permanen (JSP) atau sanitasi layak kepada masyarakat. Tahap pengangkutan dilakukan dengan adanya sistem berkala/terjadwal oleh truk tinja yang disediakan oleh Pemda atau swasta terkait. Di tahap pengolahan, tinja dibuang dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Serta pada tahap terakhir, yaitu hygiene dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) beserta fasilitas pendukungnya.³¹

Pada tahun 2016, pelayanan air minum di Kota Probolinggo hanya mencapai 59,21% dan untuk pelayanan sanitasi hanya mencapai 71,98%.³² Harapannya ditahun 2019, layanan air minum dan sanitasi di Kota Probolinggo mampu mencapai 100%. Dengan adanya Program IUWASH PLUS, akses air minum di Kota Probolinggo yang semula pada 2016 hanya mencapai 60% pada akses 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan), 10% untuk akses dasar, dan 30% untuk yang tidak memiliki akses, menunjukkan kemajuan yang pesat pada 2019 dengan adanya peningkatan menjadi 85% untuk akses 4K

dan 15% untuk akses dasar. Pada tahun 2019 0% untuk persentase masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap air minum. Data ini menunjukkan bahwa Program IUWASH PLUS yang dilakukan antara USAID dengan Pemkot Probolinggo berdampak positif secara langsung kepada masyarakat³³. Dampak positif juga terlihat pada akses air limbah. Pada tahun 2019 masih terdapat 60% masyarakat yang memiliki akses limbah yang layak, 10% untuk akses dasar pedesaan, dan 30% untuk masyarakat yang tidak memiliki akses. Namun, pada tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan menjadi 85% untuk akses layak terhadap air limbah, 15% untuk akses dasar, dan 0% untuk yang tidak memiliki akses terhadap air limbah. Perubahan data ini menunjukkan bahwa program antara USAID dan Pemkot Probolinggo ini memberi perubahan lebih baik bagi masyarakat Kota Probolinggo³⁴.

Memperkuat Kinerja Kelembagaan Water Sanitation and Hygiene (WASH) di Tingkat Kota

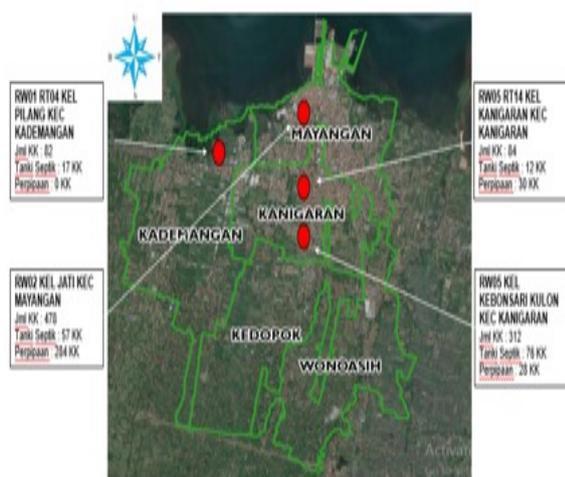
Pada Program IUWASH PLUS, USAID dan Pemkot Probolinggo membagi peran ini menjadi 3 pihak, yaitu pihak yang berasal dari Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat Rumah Tangga. Yang pada intinya kesemua pihak ini menjadikan masyarakat sebagai target pencapaian akses air minum dan sanitasi layak di Kota Probolinggo. Pihak Pemerintah yang terlibat terdiri dari Lembaga Kesehatan, Pelayanan Publik, Lembaga Eksekutif dan Yudikatif, serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pihak swasta terdiri dari layanan pengembangan bisnis, seperti Lembaga Penyedia, Perusahaan Kontruksi, dan Jasa Keuangan. Pihak masyarakat terdiri dari seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo.

31 Pemerintah Kota Probolinggo-USAID IUWASH PLUS. "Kronologi Kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dengan USAID IUWASH PLUS Tahun 2017-2021", (Maret 2017): 1-9.

32 Pemerintah Kota Probolinggo-USAID IUWASH PLUS.

33 Pemerintah Kota Probolinggo-USAID IUWASH PLUS.

34 Pemerintah Kota Probolinggo-USAID IUWASH PLUS.



Sumber: Arsip Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2023.
Gambar 3. Peta Dasar Penempatan Hotspot di 5 Kecamatan di Kota Probolinggo

Pada setiap RW yang telah ditentukan pada tiga kecamatan, dilakukan pendataan mengenai akses air minum layak dan sanitasi yang digunakan untuk penentuan pembangunan sanitasi layak untuk masyarakat. Indikator penilaian meliputi, BABS di tempat terbuka, penggunaan MCK bersama/umum, adanya plengsengan/jamban Tidak Leher Angsa, Jamban Leher Angsa buangan langsung ke sungai dan badan air, Jamban Leher Angsa tangki septic tank yang kedap, serta ada tidaknya IPAL Komunal pada wilayah RW tersebut. Selain itu, juga dilakukan pendataan akses perpipaan dan non-perpipaan untuk pemetaan pembangunan akses air minum layak³⁵.

Berdasarkan data pada tabel 4 di bawah dapat disimpulkan bahwa RW 02 Kelurahan Jati menonjol dalam akses sanitasi yang

Tabel 4. Data Akses Air Minum dan Sanitasi pada RW Terpilih di Tiga Kecamatan di Kota Probolinggo

Indikator Pendataan	RW 01 RT 04 Kel Pilang Kec Kademangan	RW 02 Kel Jati Kec Mayangan	RW 05 RT 14 Kel Kanigaran Kec Kanigaran	RW 05 Kel Kebonsari Kulon Kec Kanigaran
Pendataan Akses Sanitasi				
BABS di Tempat Terbuka	8	10	4	46
MCK Bersama/Umum	0	49	1	19
Plengsengan/Jamban Tidak Leher Angsa	0	3	0	0
Jamban Leher Angsa Buangan Langsung ke Badan Air/Sungai	3	51	4	16
Jamban Leher Angsa Penampungan tidak Kedap	6	293	63	155
Jamban Leher Angsa Tangki Septic Tank yang Kedap	17	57	12	76
IPAL Komunal	48	15	0	0
Pendataan Akses Air Minum				
Perpipaan	0	284	30	28
Non-Perpipaan	82	194	54	284

Source: Peta Dasar Akses Santasi dan Air Minum, 2018

35 Bappedalitbang Kota Probolinggo, "Target dan Rencana Kerja Air Minum dan Sanitasi Kota Probolinggo", (Juni 2022): 1-8.

lebih baik, terutama dalam MCK Bersama/ Umum dan IPAL Komunal. RW 05 Kel Kebonsari memiliki tantangan besar dalam sanitasi, terutama terkait dengan BABS di Tempat Terbuka dan Jamban Leher Angsa Penampungan Tidak Kedap. Akses air minum melalui perpipaan mengalami peningkatan signifikan di RW 02 Kel Jati, sementara RW 05 Kel Kebonsari menunjukkan variasi sumber air minum. Sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan sanitasi di RW 05 Kel Kebonsari. RW 02 Kel Jati dapat dijadikan contohbaik dalam pengelolaan sanitasi.

Pemerintah dapat mempertimbangkan pengembangan infrastruktur air minum berbasis perpipaan untuk meningkatkan akses air bersih.

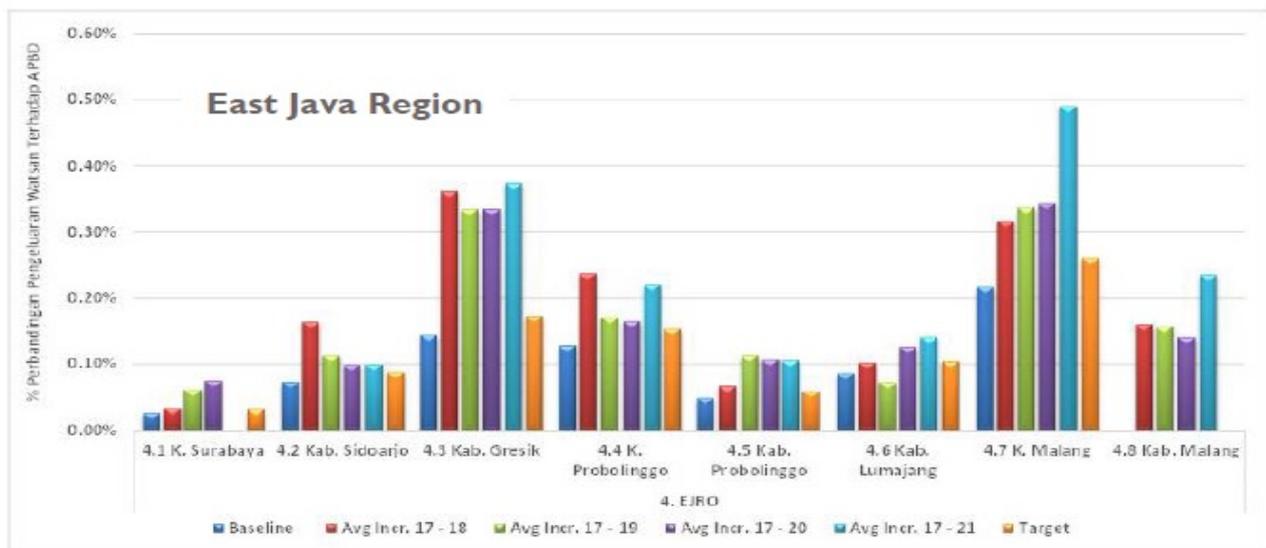
Memperkuat Lingkungan Pembiayaan Water Sanitation and Hygiene (WASH)

Secara umum, di seluruh kota dan kabupaten yang terlibat dengan IUWASH PLUS, terdapat peningkatan kecil, hingga awal tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Saat itu, Pemerintah Indonesia menginstruksikan pemda untuk mengalihkan

anggaran ke sektor kesehatan. Oleh karena itu, sebagian dana yang didedikasikan untuk infrastruktur WASH harus dialihkan untuk sementara waktu ke infrastruktur kebersihan dan sosial, sehingga memperlambat kemajuan pembangunan air dan sanitasi. USAID IUWASH PLUS menargetkan peningkatan alokasi anggaran WASH sebesar 20% sebagai hasil dari bantuan teknis yang diberikan untuk peningkatan WASH di pemda terkait³⁶. Secara umum, meskipun alokasi anggaran dasar pada awalnya cukup kecil, sebagian besar dari 35 kotamadya mencatat adanya peningkatan, dengan rata-rata peningkatan lebih dari target yang sebesar 20%. Rata-rata alokasi anggaran WASH pada baseline adalah 0,1% dan hasil akhirnya meningkat menjadi rata-rata 0,20%.

Kerjasama Pemkot Probolinggo dengan USAID pada Program IUWASH-PLUS dalam Perspektif Paradiplomasi

Dalam studi kasus ini, pemerintah pusat dan pemda bekerja sama dalam merumuskan kebijakan dan program-program pembangunan pada Program IUWASH-PLUS, untuk memastikan keselarasan antara



Sumber: USAID Final Report, 2022.

Gambar 4. Persentase Perbandingan Pengeluaran WASH terhadap APBN Tahun 2017-2021

36 Bappedalitbang Kota Probolinggo, "Target dan Rencana Kerja Air Minum dan Sanitasi Kota Probolinggo", (Juni 2022): 1-8.

kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Selain itu, Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program di tingkat lokal untuk memastikan bahwa program mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak yang positif. Pemda (Pemda) Kota Probolinggo berperan sebagai pemangku kepentingan utama di tingkat lokal yang bertugas dalam melakukan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* lokal, alokasi sumber daya, dan penyediaan dukungan kebijakan untuk mendukung tujuan program. Hubungannya, pemda berkolaborasi dengan USAID serta berbagai aktor subnasional dan *stakeholder* lokal lainnya, untuk menjalankan program dengan efektif. Selain itu, USAID dalam hal ini berperan sebagai agen eksternal yang memberikan sumber daya finansial, teknis, dan manajerial untuk mendukung pelaksanaan Program IUWASH-PLUS di Kota Probolinggo dalam bentuk pelatihan, konsultasi ahli, dan pengalaman internasional dalam bidang air bersih dan sanitasi. USAID berkolaborasi dengan pemda, organisasi non-pemerintah lokal, dan masyarakat untuk merancang dan melaksanakan program. Selain pemda dan USAID, Organisasi Non-Pemerintah (LSM, Komunitas) juga bekerja sama dengan pemda, USAID, dan *stakeholder* lainnya untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat lokal tercakup dalam program dan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait.

Dalam kerangka kerja sama, pemda dan mitra eksternal saling menghormati kedaulatan negara masing-masing. Mereka memahami dan mengakui bahwa setiap entitas memiliki hak untuk mengelola urusan dalam wilayahnya sendiri sesuai dengan kebijakan dan kepentingannya, tanpa campur tangan dari pihak lain. Kerjasama yang terjalin tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam jangka pendek, tetapi

juga untuk memperkuat hubungan yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, kerjasama yang terjalin telah sesuai dengan prinsip-prinsip paradiplomasi oleh Pluijm & Melissen (2007).

Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang peran USAID melalui Program IUWASH-PLUS di Kota Probolinggo selama periode 2017-2021, dengan fokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi. Topik ini dianalisis dari perspektif paradiplomasi, dimana aktor-aktor subnasional seperti pemda (kota/provinsi) memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan internasional dengan aktor negara, subnegara, maupun non negara di negara lain. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Program IUWASH-PLUS berhasil meningkatkan akses dan kualitas layanan air bersih dan sanitasi di Kota Probolinggo. Inisiatif ini mencakup pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas lokal. Selain itu, USAID melalui Program IUWASH-PLUS tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat lokal. Pemberdayaan ini memperkuat peran subnasional, menciptakan dasar yang kuat untuk aktivitas paradiplomatik.

Pada akhir pendampingan IUWASH PLUS, capaian pembangunan untuk sektor air minum dan sanitasi Kota Probolinggo mencapai 95,95% untuk akses sanitasi layak dan angka BABS menurun menjadi 4,05%, sedangkan akses untuk air minum mencapai 100% yang terdiri dari layanan perpipaan 59,60% dan non perpipaan sebesar 40,40%. Dengan kondisi capaian tersebut maka Pemkot Probolinggo perlu untuk melakukan percepatan pembangunan di sektor air minum dan sanitasi, agar target yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu akses sanitasi 100% atau mencapai open defecation free (ODF)

dan akses jaringan perpipaan sebesar 76% di tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan air limbah dan sanitasi di Kota Probolinggo, penting untuk menjaga keberlanjutan program pendampingan kepada masyarakat dalam penanganan pengelolaan air limbah domestik, memastikan partisipasi berkelanjutan dari warga. Selanjutnya, diperlukan pemisahan peran regulator dan operator dalam pengelolaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) untuk meningkatkan efisiensi. Peningkatan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) perlu menjadi fokus, termasuk upaya meningkatkan kualitas layanan dan pemantauan yang rutin. Selain itu, penting untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Open Defecation Free (ODF) melalui pendekatan komprehensif terhadap perilaku sanitasi masyarakat. Langkah-langkah berikutnya mencakup pengurangan Non Revenue Water (NRW) dan peningkatan Full Cost Recovery (FCR) pada Perumda Air Minum Bayuangga, yang akan memberikan dasar keuangan yang kuat. Meningkatkan cakupan pemasaran dan pelayanan air oleh Perumda Air Minum Bayuangga juga menjadi prioritas, serta menetapkan dan mengimplementasikan Rencana Bisnis Perumda Air Minum Bayuangga guna memberikan panduan dalam pengelolaan layanan air yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviyani, Silvia Risma, and Radityaningrum, Arlini Dyah. "Evaluasi Sistem Pengolahan dan Distribusi Air Bersih PDAM Kota Probolinggo." Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, no. 1 (Desember 2021): 1-8.
- Badan Pemeriksa Keuangan. "Kota Probolinggo", Badan Pemeriksa Keuangan, 27 Desember 2020. diakses 18 Desember 2023. <https://jatim.bpk.go.id/kota-probolinggo/>.
- Bappedalitbang Kota Probolinggo. "Target dan Rencana Kerja Air Minum dan Sanitasi Kota Probolinggo". (Juni 2022): 1-8.
- BPS Provinsi Jawa Timur. "Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Bersih." BPS Provinsi Jawa Timur, 13 Juni 2023. Diakses 18 Desember 2023, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/06/13/2900/persentase-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-sumber-air-minum-bersih-dan-akses-air-minum-layak-2022.html>.
- BPS Provinsi Jawa Timur. "Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Bersih." BPS Provinsi Jawa Timur, 13 Juni 2023. Diakses 18 Desember 2023. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/06/13/2900/persentase-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-sumber-air-minum-bersih-dan-akses-air-minum-layak-2022.html>.
- Ciesielska-Klikowska, Kamillski. "Paradiplomacy and its Impact on EU Foreign Policy." *Journal of Contemporary European Research*, no. 1 (Juli 2022): 48-66.
- Dary, Nida Hanin, and Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, and Suharto, Didik G. "Strengthening The Role of Public Administration in The Global Changing Society: Public Sector Reform

- & *Digital Transformation in Asia*". Indonesia Association for Public Administration, no. 1 (November 2019): 448-471.
- Dermawan, Windy and Darmawan, Ivan and Mustofa, Mustabsyrotul Ummah, and Djuyandi, Yusa. "Paradiplomacy practices in Indonesia: Comparative analysis of Aceh-Quebec." *Politics and Policy*, no. 2 (Maret 2022): 363-379.
- Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang, Perumahan, & Kawasan Pemukiman, "Geografis," Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan & Kawasan Pemukiman. 31 Desember 2014. Diakses 19 Desember 2023. <https://dpuprpkp.probolinggokota.go.id/page/geografis>.
- Isnarti, Rika, and Trisni, Sofia, "The City of Padang Challenges for Paradiplomacy," *AEGIS: Journal of International Relations*, no. 2 (September 2020): 48-68.
- Jesus, Diego Santos Vieira de. "The Art of Encounter: Paradiplomacy and Internationalization of Creative Cities." *Revista de Sociologia e Politica* no. 2 (Maret 2017): 51-76.
- Mukti, Takdir Ali. *Paradiplomacy: Kerja sama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta, 2013.
- Mukti, Takdir Ali. *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia*. Yogyakarta: 2020.
- Nganje, Fritz. "Sub-State Diplomacy and The Foreign Policy-Development Nexus in South Africa." *South African Journal of International Affairs*, no.1 (Maret 2016): 1-20.
- Nye, Joseph S. and Keohane, Robert O. "Transnational Relations and World Politics: An Introduction." *The University of Wisconsin Press Journals Division*, no.3 (Agustus 2010): 329-333.
- Pemerintah Kota Probolinggo-IUWASH PLUS. "Partnership Agreement Between The Government of Probolinggo City and Indonesia Urban Water, Sanitation & Hygiene. *Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS)*", Pemerintah Kota Probolinggo-IUWASH PLUS. (Maret 2017): 1-7.
- Pemerintah Kota Probolinggo-USAID IUWASH PLUS. "Kronologi Kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dengan USAID IUWASH PLUS Tahun 2017-2021". (Maret 2017): 1-9.
- Pemerintah Pusat, "Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan". Badan Pemeriksa Keuangan. 30 September 2014. Diakses 12 Desember 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Pemerintah Pusat, "Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan". Badan Pemeriksa Keuangan, 21 Agustus 2018. Diakses 30 April 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/92041/pp-no-39-tahun-2018>.
- Pemerintah Pusat, "Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan". Badan Pemeriksa Keuangan, 17 September 2017, diakses 30 April 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111443/permendagri-no-85-tahun-2017>.
- Pluijm, Rogier van der, and Melissen, Jan, *City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics*, (Netherland, 2007), 33-36.
- Scicchitano, John. "International Measurement of Food Security: Enhancing Alignment Between Evidence and Assistance Programs". *Journal of Public Affairs*, no. 3 (Juni 2018): 18-37.
- Surwandono, and Maksum, Ali. "The Architecture of Paradiplomacy Regime in Indonesia: A Content Analysis, *Global: Jurnal Politik Internasional*, no. 1 (Juli 2020):

77-99.

Tidwell, Alan. "Strategic Competition and The Evolving Role of Indo-Pacific Paradiplomacy." *Australian Journal of International Affairs*, no. 1 (Oktober 2020): 103-119.

USAID IUWASH Tangguh. "Kegiatan Kami," USAID IUWASH Tangguh. 21 Maret 2022. Diakses 12 Desember 2023. <https://iuwashtangguh.or.id/kegiatan-kami/>

Utomo, Ario Bimo. "Paradiplomacy as a Product of State Transformation in The Era of Globalisation: The Case of Indonesia." *Janus.net e-Journal of International Relations*, no. 1 (Oktober 2022): 63-78.

Wright. *Attitudes and The Fundamental Negative Bias: Conditions and Corrections*. (New York: Springer, 1988), 3-21. *Ublu imus. Consimihil vir auderum, es etis.*